

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI
PULAU SUMATERA TAHUN 2014-2016**

JURNAL



Oleh

**NAMA : Aldi Abdullah Arif
NIM : 14313285
JURUSAN : Ilmu Ekonomi**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI
PULAU SUMATERA TAHUN 2014-2016**

**Aldi Abdullah Arif
Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
Aldiarif233@gmail.com**

Abstrak

Ketimpangan merupakan permasalahan pembangunan yang belum dapat dihapuskan terutama pada Negara sedang berkembang. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan antar propinsi di Pulau Sumatera, dan membuktikan Hipotesis, serta menganalisis pengaruh variabel tingkat pengangguran terbuka, PDRB, upah minimum propinsi, kemiskinan dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2016. Data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu darisampel. Data yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series yang digunakan dalam penelitian ini disebut dengan data panel.

Dalam Penelitian ini digunakan analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan metode data panel dan sebagai alat dalam pengolahan datanya yaitu menggunakan program Eviews 8. Hasil analisis dari penelitian ada variabel yang berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar propinsi di Pulau Sumatera yaitu variabel UMP, sedangkan yang berpengaruh positif adalah PDRB dan kemiskinan, satu variabel tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan adalah variabel tingkat pengangguran terbuka.

Kata Kunci : Ketimpangan distribusi pendapatan, Kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka, UMP dan PDRB

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan–kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, atau dengan kata lain pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2004).

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa setiap tahunnya (Tambunan, 2001).

Indonesia adalah salah satu negara sedang berkembang yang pernah mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi selama beberapa periode. Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari strategi pembangunan yang berpilar pada trilogi pembangunan, dengan prioritas pertumbuhan ekonomi di awal pembangunan orde baru. Mantapnya laju pertumbuhan ekonomi, selain meningkatkan perbaikan ekonomi, ternyata juga diikuti oleh ketimpangan distribusi pendapatan di beberapa daerah. Dinamika spasial pembangunan Indonesia memperlihatkan ketimpangan antar daerah. Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi didalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 2004). Menurut Sukirno (2010), pembangunan ekonomi pada umumnya

didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya pembangunan ekonomi yang tinggi pada suatu negara akan mampu menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat yang ada pada negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara juga berkaitan langsung dengan adanya pembangunan ekonomi, dimana ketika pembangunan ekonomi dikaitkan dengan kenaikan pendapatan nasional maka adanya kenaikan pendapatan nasional tersebut juga merupakan salah satu indikasi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan adanya kenaikan output nasional dalam jangka waktu yang panjang (Boediono, 2005).

Sejak otonomi daerah di Indonesia diberlakukan membuat daerah meningkatkan pembangunan dan perekonomian menjadi luas. Permasalahan yang terjadi setelah adanya otonomi tersebut adalah ketimpangan pendapatan yang terjadi setiap daerah. Dampak dari terjadinya ketimpangan dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya sehingga akan tercapai kesejahteraannya. Dampak negatif dari ketimpangan antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2004). Dampak negatif ketimpangan inilah yang akan menjadi masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga

tenaga terampil, dengan tidak meratanya investor yang masuk maka akan dapat menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan adanya pengangguran. Di samping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi kepada daerah seperti provinsi atau kabupaten (Kuncoro, 2004).

Permasalahan ketimpangan yang ada saat ini tentunya akan dapat menggagalkan pembangunan ekonomi dari setiap daerah, dimana ketimpangan juga merupakan faktor terpenting yang di perhatikan dalam pembangunan ekonomi. Adanya ketimpangan pendapatan seperti yang terjadi di setiap Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tentunya dapat membedakan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di setiap Provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin antar propinsi di Indonesia berbeda, akan tetapi yang menjadi sorotan adalah jumlah penduduk miskin propinsi di Pulau Sumatera yang cukup tinggi dibandingkan dengan propinsi lain di luar Pulau Sumatera terutama Pulau Jawa. Padahal setiap propinsi memiliki akses dan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Akan tetapi provinsi-provinsi yang ada di pulau Sumatera tidak mendapatkan akses yang mudah, dimana akses untuk kepusat pemerintahan lebih susah begitu juga sebaliknya dari pusat ke daerah yang ada di pulau Sumatera dibandingkan dengan daerah yang ada di pulau jawa. Dengan meningkatnya kemiskinan maka maka kesejahteraan akan menrun yan berarti akan terjadinya ketimpangan pendapatan antar provinsi maupun antar masyarakat.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan adalah *Ratio Gini*. Nilai *Ratio Gini* berkisar antara nol dan satu bila *Ratio Gini* sama dengan nol berarti distribusi pendapatan sangat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun, apabila *Ratio Gini* sama dengan satu maka menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi. *Ratio Gini* di setiap Provinsi yang ada di pulau Sumatera pada kurun waktu 2014-2016, terindikasi terjadinya

penurunan, akan tetapi ada sebagian yang meningkat atau tetap berada pada tingkat ketimpangan pada tahun sebelumnya. Padahal setiap tahunnya peningkatan Produk Domestik bruto perkapita yang di buktikan dengan peningkatan Upah Minimum Provinsi dari tahun ketahun tidak dapat menurunkan Indek Gini, hal ini berarti pembangunan ekonomi belum mampu menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat. Rata-rata tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera berada pada tingkat ketimpangan sedang, akan tetapi perlu adanya kajian secara ilmiah agar tingkat ketimpangan menurun menjadi ringan serta menghindari kemungkinan terjadinya peningkatan ketimpangan. Ketimpangan antar Provinsi di Pulau sumatera dari 10 Provinsi yang ada, Ketimpangan yang paling tinggi secara keseluruhan terjadi di Provinsi Kep Riau, pada 2014 terjadi ketimpangan di Provinsi Kep Riau sebesar 0.437%. Dalam hal ini angka sebesar 0.437% termasuk dalam kategori ketimpangan yang sedang dan sudah mulai mengkhawatirkan.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pengertian pendapatan menurut Soediyono (1992) adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat dalam waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi nasional. Faktor-faktor produksi nasional meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan kewirausahaan (skill). Secara umum, pendapatan diartikan sebagai sejumlah uang yang diperoleh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Pendapatan dapat berasal dari sektor formal dan non formal.

Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerahdan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusipendapatan daerah semakin melebar (Retnosari, 2006).

Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua yaitu, distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan. Sedangkan distribusi pendapatan mutlak adalah presentasi jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari padanya (Sukirno, 2006).

Pemerataan pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi. Pertama pembagian pendapatan antar lapisan masyarakat. Kedua, pembagian pendapatan antar daerah, yaitu daerah perkotaan dan pedesaan. Ketiga pembagian pendapatan antar wilayah, dalam hal ini antar kabupaten/kota (Dumairy, 1996).

Ketimpangan Antar Provinsi

Menurut Sjafrizal (2012), Ketimpangan antar Daerah (Provinsi) merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bila mana pada setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (developed region) dan wilayah relatif terbelakang (underdeveloped region). Namun dengan adanya ketimpangan dari penyebab adanya pembangunan di setiap daerah, perlu adanya evaluasi untuk merumuskan kebijakan agar ketimpangan antar daerah tidak terjadi.

Analisis yang menghubungkan tahap pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan serta ungkapan pertumbuhan versus pemerataan sebenarnya dipicu oleh sebuah penemuan yang dimulai oleh Simon Kuznet (1955). Simon Kuznet menghubungkan laju pertumbuhan berbagai negara maju dan negara sedang berkembang dengan mengamati data time series untuk Amerika, Inggris dan Jerman serta data cross section yang mencakup tiga negara tersebut ditambah India, Sri Lanka serta Puerto Rico, hasil pengamatan tersebut Kuznet menemukan sebuah pola yang berbentuk U terbalik. Pola tersebut mensyaratkan

bahwa pada tahap awal perkembangan (diwakili oleh Produk Domestik Bruto per kapita yang masih rendah), maka proses pertumbuhan diikuti oleh semakin memburuhnya distribusi pendapatan dan setelah mencapai titik tertentu, pembangunan akan diikuti oleh membaiknya pemerataan. Pembangunan dengan hasil seperti yang digambarkan oleh hipotesis U terbalik, sebagian besar didasarkan pada model pembangunan Dualistik.. (Munawar Ismail, 1995)

Indeks Gini

Indeks Gini didapatkan dengan cara menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemeraan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana kurva Lorenz tersebut berada (Lincoln Arsyad, 2010). Secara teknis, langkah awal yaitu penduduk diurutkan dari yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan paling rendah sampai dengan yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan paling tinggi. Kemudian dibuat kelas-kelas setiap 10% dari paling rendah sampai paling tinggi. Langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi persentase dan kumulatif persentase baik untuk penduduk penerima pendapatan maupun pendapatan yang diterima. Nilai dari indeks Gini terletak antara 0 sampai 1. Angka 0 menunjukkan kemeraan sempurna, sedangkan 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (Word Bank, 2004). Proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya terletak di bawah garis kemiskinan nasional yang disepakati resmi pemerintah. Garis kemiskinan ini merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia, maka dipakai pendekatan data konsumsi (pengeluaran). Termasuk pengeluaran adalah perkiraan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.

Menurut Ravallion (2001) kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Jadi kemiskinan dapat diartikan dimana kondisi suatu individu atau kelompok yang dihadapi pada sebuah kondisi dimana ketidakmampuannya individu atau kelompok tersebut untuk memenuhi kebutuhan akan kepentingan pribadinya seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan yang dipengaruhi karena pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup. Dan kemiskinan juga mempengaruhi perkembangan dari prekonomian daerah itu sendiri dimana terhambatnya proses pembangunan daerah itu sendiri, dan juga menghambat arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.

Jumlah penduduk miskin antar propinsi di Indonesia berbeda, akan tetapi yang menjadi sorotan adalah jumlah penduduk miskin propinsi di Pulau Sumatera yang cukup tinggi dibandingkan dengan propinsi lain di luar Pulau Sumatera. Padahal setiap propinsi memiliki akses dan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Akan tetapi provinsi-provinsi yang ada di pulau Sumatera tidak mendapatkan akses yang mudah, dimana akses untuk kepusat pemerintahan lebih susah begitu juga sebaliknya dari pusat ke daerah yang ada di pulau Sumatera dibandingkan dengan daerah yang ada di pulau Jawa.

PDRB Perkapita

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga kosntan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Dalam melakukan penghitungan PDRB per kapita dilakukan menggunakan beberapa cara, yaitu :

1. Cara Pengeluaran.

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah pengeluaran ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi dan pengeluaran pemerintah serta pendapatan ekspor dikurangi dengan pengeluaran untuk barang-barang impor.

2. Cara Produksi atau cara produk netto.

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahka nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara produksi yang dijumlahkan hanyalah nilai produksi tambahan atau valueaddedyang diciptakan.

3. Cara Pendapatan.

Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Upah Minimum Provinsi

Menurut Sadono (2004) upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa –jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Sementara itu menurut Sumarsono (2003), perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, makaakan terjadi hal-hal sebagai berikut.

Pertama, naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang di produksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang

yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang di butuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi tersebut dengan efek skala produksi atau scale effect.

Kedua, apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lain tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya pergantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (substitution effect).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut Dumary(1996) penganggur ialah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan. Pengangguran semacam ini oleh Badan Pusat Statistik dinyatakan sebagai penganggur terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggu/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingkat pengangguran di negara-negara berkembang termasuk Indonesia biasanya terlihat rendah dan cenderung menutupi potret yang lebih penting dalam pasar kerja seperti tingkat upah yang rendah dan keberadaan sektor informal yang jumlahnya sangat besar. Rendahnya tingkat pengangguran di Indonesia utamanya disebabkan karena penduduk khususnya yang berasal dari rumah tangga miskin akan melakukan pekerjaan apa saja untuk memperoleh pendapatan guna mempertahankan hidup yang disebabkan tiadanya jaminan atau kompensasi bagi penganggur. Untuk itu penduduk terpaksa bekerja dalam kegiatan apapun baik dengan jam kerja yang lebih rendah dari yang diinginkan, kurang dari jam kerja normal atau bekerja purna waktu (full time). Oleh karena itu, tingkat setengah

pengangguran tampaknya merupakan indikator yang lebih baik bagi pasar kerja dibandingkan tingkat pengangguran dan merupakan indikator pemanfaatan tenaga kerja (labour utilization) yang lebih realistis di negara berkembang seperti Indonesia.

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang ada maka peneliti membuat sebuah hipotesis dan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar propinsi di Pulau Sumatera.
2. PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
3. Upah Minimum Provinsi berpengaruh Negatif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera.
4. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk mempermudah analisis dan memperjelas variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka dilakukan variabel operasional sebagai berikut :

1. Ketimpangan distribusi pendapatan (Y) dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan relatif ditinjau dari pembagian pendapatan antar lapisan masyarakat Provinsi di Pulau Sumatera. Indikator ketimpangan yang dipakai adalah indeks Gini yang diturunkan dari kurva Lorenz. Data diperoleh dari situs (<https://bps.go.id/>) yang pengambilan data dalam tahun, selama periode 2014-2016.
2. Kemiskinan (X1) yang terjadi di setiap propinsi di Pulau Sumatera berbeda-beda, sehingga menyebabkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan suatu propinsi menjadi meningkat yang berujung pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Data kemiskinan yang digunakan adalah data kemiskinan propinsi se-Pulau Sumatera dari tahun

dalam satuan persen (%), Data diperoleh dari situs (<https://bps.go.id/>) selama periode 2014-2016.

3. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto (X2) merupakan jumlah penerimaan dari daerah sendiri, atau kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu atas dasar biaya faktor. Data diperoleh dari situs (<https://bps.go.id/>) yang dinyatakan dalam satuan milyar rupiah serta pengambilan data dalam tahun, selama periode 2014-2016.
4. UMP (X3) merupakan garis minimal dari pendapatan masyarakat yang berkerja sesuai dengan waktu yang di tentukan dalam bekerja, apa bila UMP meningkat maka konsumsi dan tabungan masyarakat juga akan meningkat. Data UMP Provinsi di Pulau Sumatera diperoleh dari situs (<https://bps.go.id/>) selama periode 2014-2016.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) yang terjadi di setiap propinsi di Pulau Sumatera berbeda-beda, sehingga menyebabkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan suatu propinsi menjadi meningkat yang berujung pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Data tingkat pengangguran terbuka yang digunakan adalah data kemiskinan propinsi se-Pulau Sumatera dari tahun dalam satuan persen (%), Data diperoleh dari situs (<https://bps.go.id/>) selama periode 2014-2016.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data panel Di Provinsi Pulau Sumatera pada kurun waktu dari tahun 2014-2016. Data kuantitatif yaitu data yang berwujud dalam kumpulan angka-angka. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung atau data yang sudah diolah. Data sekunder disini menggunakan data antar tempat atau ruang (cross section) yang diambil dari keseluruhan Provinsi di Pulau Sumatera, sedangkan untuk data antar waktunya (time series) diambil pada tahun 2014-2016, dimana data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Data yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time

series yang digunakan dalam penelitian ini disebut dengan data panel. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

TEKNIK DAN ANALISIS DATA

Metode Analisis

Dalam Penelitian ini digunakan analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan metode data panel dan sebagai alat dalam pengolahan datanya yaitu menggunakan program Eviews 8.

Metode Regresi Data Panel

Adapun tiga model pendekatan atau langkah-langkah dalam melakukan regresi adalah sebagai berikut :

1. Common Effect Model (CE)

Metode Common Effect merupakan metode yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross section dengan metode Ordinary Least Squares(OLS).

2. Fixed Effect Model

Model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar ruang dan waktu. Dalam estimasi model Fixed Effect dapat dilakukan dengan menggunakan dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini sering disebut dengan Least Squares Dummy Variables(LSDV).

3. Random Effect Model

Metode ini memilih estimasi data panel dengan residual yang mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap propinsi mempunyai intersep. Namun demikian diasumsikan bahwa intersep adalah variable random.

Pemilihan dalam Model Pengolahan Data Panel

Pemilihan model yang akan digunakan dalam sebuah penelitian sangat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dugaan yang efisien. Dan beberapa metode yang paling baik untuk digunakan adalah :

1. Chow Test(uji F-statistik) adalah pengujian untuk memilih model Common Effect(tanpa variable dummy) atau dengan model Fixed Effect.
2. Uji Hausman untuk membandingkan antara model Fixed Effectatau Random Effect yang lebih baik untuk digunakan.

Uji Statistik

1. Uji Determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik garis regresi cocok dengan datanya atau mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka kita mempunyai garis regresi byang kurang baik. (Widarjono, 2009)

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen (Widarjono, 2009:69).

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t statistik)

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung $>$ t kritis, maka H_0 ditolak maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung $<$ t kritis maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen (Widarjono, 2009: 69)

HASIL PENELITIAN

Uji Individu (uji t)

Tabel
Hasil Uji t dari Random effects

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probabilitas
C	0.307457	0.037763	8.141798	0.0000
X1?	0.005698	0.001362	4.183725	0.0003
X2?	1.59E-06	3.18E-07	4.982595	0.0000
X3?	-3.68E-08	1.69E-08	-2.174052	0.0394
X4?	-0.003620	0.002790	-1.297253	0.2064

Sumber: Data olahan Eviews

1. Kemiskinan (X1)

Koefisien variabel dari Kemiskinan adalah 0.005698 dan probabilitasnya sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$. Ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel Kemiskinan berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Sumatera. Itu artinya, apabila Kemiskinan naik sebesar 1% maka Ketimpangan Distribusi Pendapatan akan naik sebesar 0.005698%

2. PDRB Perkapita (X2)

Koefisien variabel dari PDRB adalah 1.59E-06 dan probabilitasnya sebesar $0.0003 < \alpha = 5\%$. Ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Sumatera. Itu artinya, apabila PDRB naik sebesar 1 ribu rupiah maka Ketimpangan Distribusi Pendapatan akan naik sebesar 1.59E-06%.

3. UMP (X3)

Koefisien variabel dari UMP adalah -3.68E-08 dan probabilitasnya sebesar $0.0394 < \alpha = 5\%$. Ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel UMP berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Sumatera. Itu artinya, apabila UMP naik sebesar 1 rupiah maka Ketimpangan Distribusi Pendapatan akan turun sebesar 3-3.68E-08%.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (X4)

Koefisien variabel dari Tingkat Pengangguran Terbuka adalah -0.003856 dan probabilitasnya sebesar $0.2129 > \alpha = 5\%$ maka gagal menolak H_0 dan menolak H_a . Ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka tidak signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

Uji Parsial (uji f)

Tabel

Hasil Uji f dari Estimasi Random Effect

R-squared	0.565636
Adjusted R-squared	0.496137
S.E. of regression	0.018939
F-statistic	8.138844
Prob(F-statistic)	0.000240

Sumber: Data olahan Eviews

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak mempengaruhi.

F-statistik sebesar 0.565636 dengan probabilitas sebesar $0.000240 < \alpha = 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Uji Determinasi (R^2)

Tabel

Uji Determinasi

R-squared	0.565636
Adjusted R-squared	0.496137
S.E. of regression	0.018939
F-statistic	8.138844
Prob(F-statistic)	0.000240

Sumber: Data olahan Eviews

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik garis regresi cocok dengan datanya atau mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik. (Widarjono, 2009).

Hasil regresi yang telah dilakukan, variabel Kemiskinan, PDRB, UMP, dan TPT terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan diperoleh nilai R^2 untuk weighted sebesar 0.565636 atau 56%. Hal ini menunjukkan variasi variabel Ketimpangan Distribusi Pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel Kemiskinan, PDRB, UMP, dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 56%. Sedangkan sisanya sebesar 48% dijelaskan oleh variabel lain diluar model tersebut.

PEMBAHASAN

Analisis pengaruh Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera

Hasil estimasi regresi berganda model linier menunjukkan kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Provinsi di Pulau Sumatera. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa kemiskinan memiliki kolerasi positif terhadap angka ketimpangan. Ini menunjukkan semakin tinggi kemiskinan disuatu daerah semakin tinggijumlah ketimpangan distribusi pendapatan.

Analisis pengaruh PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera

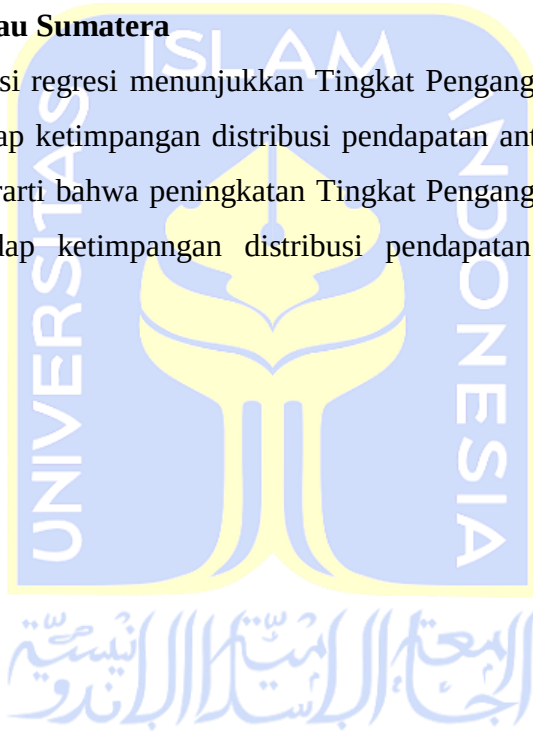
Dari hasil regresi yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan yang ada di antar Provinsi di Pulau Sumatera. Artinya apabila nilai angka dari PDRB Perkapita naik maka akan diikuti oleh kenaikan dari angka ketimpangan pendapatan. Ini berarti angka variabel PDRB Perkapita Provinsi di Pulau Sumatera yang tinggi, tidak bisa menjamin bahwa dapat menurunkan angka ketimpangan pendapatan.

Analisis pengaruh UMP terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera

Hasil estimasi regresi berganda model linier menunjukkan UMP berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Provinsi di Pulau Sumatera. Yang berarti bahwa UMP meningkat akan menurunkan ketimpangan pada provinsi di Pulau Sumatera. Artinya apabila terjadi peningkatan Upah Minimum provinsi di pulau sumatera maka akan menurunkan angka ketimpangan distribusi pendapatan baik antar provinsi maupun antar masyarakat yang ada di suatu provinsi. Hal terjadi ini karena kebijakan di setiap provinsi yang menaikkan Upah Minimum Provinsi yang kenaikannya secara merata.

Analisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera

Hasil estimasi regresi menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera. Yang berarti bahwa peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi di Pulau Sumatera.



KESIMPULAN

1. Kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Sumatera. Apabila kemiskinan di setiap daerah meningkat maka akan berdampak pada rendahnya pendapatan suatu daerah, sehingga perekonomian akan terganggu dan berimbas pada lambatnya pembangunan daerah tersebut. Semakin meningkat jumlah penduduk miskin suatu daerah maka ketimpangan distribusi pendapatan akan tinggi.
2. PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi, ketika PDRB mengalami peningkatan maka akan menyebabkan kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera meningkat namun pemerataan atau pembagian pembangunan tidak dirasakan semua kalangan. Kenaikan PDRB hanya mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan pada awal pembangunan dilakukan, setelah pembangunan itu berjalan pada tahap yang terus meningkat tanpa dibarengi pemerataan akan menyebabkan ketimpangan.
3. UMP berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antara provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini menandakan tingkat UMP dapat mendorong masyarakat untuk tidak migrasi ke daerah lain dengan mengharapkan pendapatan yang lebih. Kenaikan UMP provinsi di Pulau Sumatera dapat menahan arus migrasi masyarakat yang dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat antar provinsi maupun satu provinsi.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dikarenakan pengangguran terbuka terbagi menjadi dua yaitu, secara sukarela dan secara terpaksa. Pengangguran terbuka ini menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi di Pulau Sumatera cenderung menurun dan relatif kecil, maka dari itu Tingkat Pengangguran Terbuka yang terjadi di Pulau Sumatera tidak dapat menjelaskan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

IMPLIKASI

1. PDRB Perkapita yang berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan tentunya akan menimbulkan dampak yang negatif bagi setiap daerah yang ada karena seiring dengan peningkatan PDRB akan diikuti dengan kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat kesenjangan pendapatan merupakan permasalahan yang serius yang dihadapi oleh setiap daerah. Pembangunan yang ada bukan hanya pembangunan daerah yang bersifat terpusat namun juga yang dapat menjangkau daerah – daerah terpencil setiap Provinsi di Pulau Sumatera sehingga perekonomian dapat bergerak seimbang di setiap provinsi.
2. Agar tingkat upah minimum provinsi sesuai dengan kebutuhan serta kinerja para pekerja maka perlu adanya kebijakan yang bertujuan untuk peningkatan SDM, misalnya dengan memberikan pelatihan agar angkatan kerja memiliki keahlian di bidang pekerjaannya dengan mendorong investasi yang bersifat padat karya agar pendapatan dari masyarakat (khususnya menengah kebawah) meningkat, hal ini juga dapat menurunkan kemiskinan dan tingkat pengangguran.
3. Pemerataan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan pada seluruh golongan masyarakat menjadi tujuan utama dalam proses pembangunan ekonomi, jadi pemerintah daerah maupun pusat harus bersinergi dalam melaksanakan tahap-tahap untuk mencapai pembangunan yang merata. Sehingga pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta pencapaian yang diinginkan.